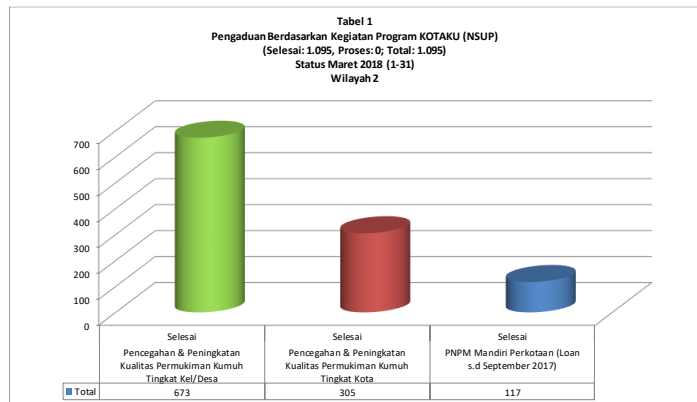


**Progres Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM)
Program KOTAKU (NSUP)
(Kota Tanpa Kumuh)
Periode Maret 2018
Wilayah 2
(OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9)**

Pendahuluan

Pada bulan Maret 2018, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 (dua) berjumlah 1.095 pengaduan (selesai 1.095 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). Data bulan ini bila dibandingkan dengan data bulan



lalu terjadi kenaikan data sebanyak 86 pengaduan (data bulan lalu sebanyak 1.009 pengaduan). Kenaikan data ini disebabkan antara lain karena ada peningkatan jumlah data pengaduan yang dikirim oleh OSP Provinsi.

Progres pengaduan di bulan Maret 2018 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat kota yang didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (116 pengaduan) dan Provinsi Kalimantan Selatan (51 pengaduan). Selengkapnya dapat dilihat di tabel 1a.

Untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa yang paling banyak diadakan adalah mengenai Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan (184 pengaduan atau 27%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pecegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota yang paling banyak diadakan adalah mengenai penetapan pagu alokasi BDI (91 pengaduan atau 30%), dan untuk lokasi bekas dampingan PNPMM Mandiri Perkotaan

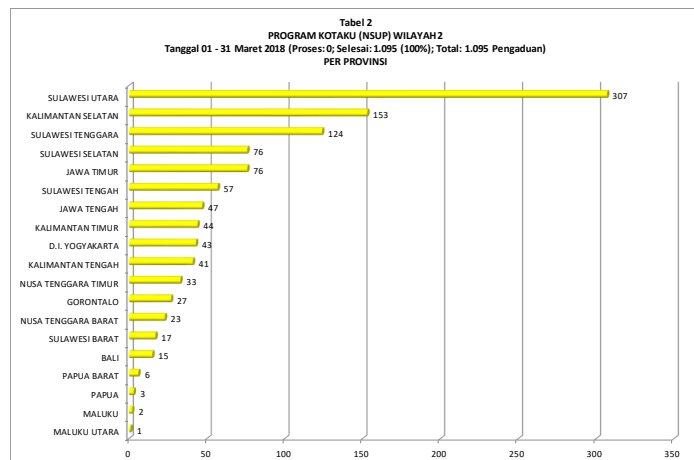
JENIS KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	BALI	D I YOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TIMUR	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	Grand Total	
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kel/Desa	13	26	12	30	54	68	24	30	1	18	21	1	3	10	52	47	90	173	673	
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kota		7	12	13	13	51	7	7	1	1	4	11		1	6	21	10	24	116	305
PNPM Mandiri Perkotaan (Loan s.d September 2017)	2	10	3	4	9	34	10	7			1	1	2	2	1	3		10	18	117
Grand Total	15	43	27	47	76	153	41	44	2	1	23	33	3	6	17	76	57	124	307	1095

yang banyak diadakan adalah pelaksanaan kegiatan pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (38 pengaduan atau 32%).

Dari tanggal 01 s/d 31 Maret 2018. Pengaduan yang terjadi dari tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan

31 Maret 2018 sebanyak 1.095 pengaduan (selesai 1.095 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

Pada tabel 2 terlihat bahwa seluruh Provinsi ada pengaduannya yang terjadi dari tanggal 01 sampai 31 Maret 2018.



A. Progres PIM di program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2 Periode Maret 2018

1. Gambaran Umum

INFORMATIF				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Kritik	46	-	46
2	Saran	48	-	48
3	Pertanyaan	991	-	991
Sub Total		1,085	-	1,085
MASALAH				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Mekanisme & Prosedur	7	-	7
2	Penyimpangan Dana	-	-	-
3	Intervensi Negatif	-	-	-
4	Perubahan Kebijakan	1	-	1
5	Kode Etik	2	-	2
6	Force Majeur	-	-	-
Sub Total		10	-	10
TOTAL		1,095	-	1,095
Persentase		100.0%	0.0%	

Sumber: Data SIM PPM 31 Maret 2018

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PIM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 yang terjadi pada tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2018, total pengaduan yang telah dikelola berjumlah 1.095 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai sejumlah 1.095 (100%) pengaduan dan status proses sejumlah 0 (0%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif

sejumlah 1.085 (99%) [selesai 1.085 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 10 (1%) [selesai 10 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 jumlah pengaduan berdasarkan sifat pengaduan.

Perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Maret – 31 Maret 2018 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (1983 Kelurahan) memperoleh 2,4% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 100%. (Lihat tabel 4)

Adapun rata-rata pengaduan PROGRAM KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2 periode 01 – 28 Maret 2018 sebesar 16%.

Sedangkan provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 4 adalah Jawa Tengah (6,9%), Jawa Timur (3%), Maluku (6%), dan Maluku Utara (2%), Papua (8%) dan Papua Barat (0%).

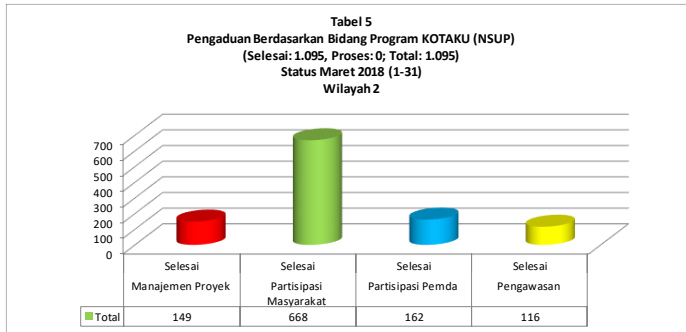
Secara keseluruhan selama periode 01 – 31 Maret 2018 jumlah pengaduan yang masuk ada 1.095 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 100%.

Tabel 4
Perbandingan Jumlah Kelurahan Dengan Jumlah Pengaduan
Periode 01 - 31 Maret 2018 Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2

Provinsi	Jml Kel	Jml Pengdn	Jml %	Selesai	Jml %	Proses	Jml %
Jawa Tengah	1,983	47	2.4	47	100.0	-	-
DI Yogyakarta	178	43	24	43	100.0	-	-
Jawa Timur	1,857	76	4	76	100.0	-	-
Bali	130	15	12	15	100.0	-	-
Nusa Tenggara Barat	219	23	11	23	100.0	-	-
Nusa Tenggara Timur	130	33	25	33	100.0	-	-
Kalimantan Tengah	41	41	100	41	100.0	-	-
Kalimantan Selatan	239	153	64	153	100.0	-	-
Kalimantan Timur	145	44	30	44	100.0	-	-
Sulawesi Utara	307	307	100	307	100.0	-	-
Sulawesi Tengah	58	57	98	57	100.0	-	-
Sulawesi Selatan	321	76	24	76	100.0	-	-
Sulawesi Tenggara	129	124	96	124	100.0	-	-
Gorontalo	73	27	37	27	100.0	-	-
Sulawesi Barat	17	17	100	17	100.0	-	-
Maluku	84	2	2	2	100.0	-	-
Maluku Utara	152	1	1	1	100.0	-	-
Papua Barat	41	6	15	6	100.0	-	-
Papua	39	3	8	3	100.0	-	-
Total	6,143	1,095	18	1,095	100.0	0	0.0

2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) pengawasan, (2) manajemen proyek, (3) partisipasi Pemda, dan (4) partisipasi masyarakat. Bidang pengaduan tersebut tercakup dalam lingkup administrasi teknis dan keuangan.



Adapun lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). termasuk administrasi penyaluran BDI (bantuan dana

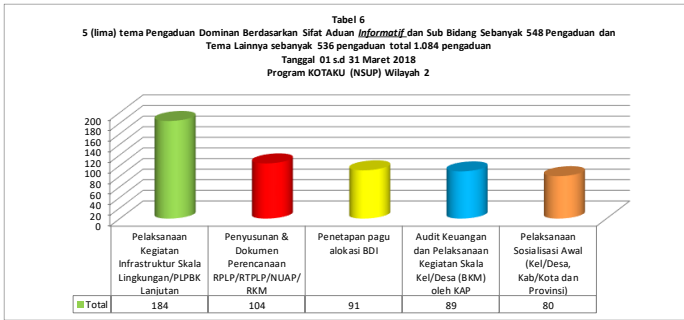
investasi). Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pembayaran dan pemanfaatan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) di wilayah masing-masing.

Pada tabel 5 untuk pengaduan dalam kategori bidang manajemen proyek sebanyak 149 pengaduan (selesai 149 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi masyarakat sebanyak 668 pengaduan (selesai 668 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi Pemda sebanyak 162 pengaduan (selesai 162 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); dan bidang pengawasan sebanyak 116 pengaduan (selesai 116 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

Selengkapnya lihat tabel 5a per provinsi.

BIDANG/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	B	A	L	I	D	G	O	R	O	N	T	A	L	O	J	A	W	A	T	I	M	U	R	K	A	L	I	M	A	N	T	A	N	T	E	N	G	A	R	A	M	A	L	U	K	U	M	A	L	U	K	U	P	A	P	P	U	A	B	A	R	A	T	S	U	L	A	W	E	S	I	S	E	L	A	T	A	N	S	U	L	A	W	E	S	I	S	U	L	A	W	E	S	I	G	r	a	n	d	T	o	t	a	l
Manajemen Proyek	6	1	17	7	33	6	1	1	2	1	1	1	2	13	1	13	43	149																																																																																						
Partisipasi Masyarakat	12	31	12	20	46	88	33	33	1	18	21	2	5	11	49	45	98	143	668																																																																																					
Partisipasi Pemda	1	2	3	5	17	7	2			2	10			4	8	10	12	79	162																																																																																					
Pengawasan	3	5	12	7	18	15	1	3		1	1				6	1	1	42	116																																																																																					
Grand Total	15	43	27	47	76	153	41	44	2	1	23	33	3	6	17	76	57	124	307	1095																																																																																				

3. Pengaduan berdasarkan Sifat Pengaduan



Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud dengan

pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif tersebut **harus** dimasukkan dalam format manual PIM berbasis Ms. Excel. Demikian juga dengan pengaduan yang bersifat masalah adalah pengaduan yang yang terkait dengan unsur mekanisme & prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, dan force majeure.

Berdasarkan data pada bulan Maret 2018 untuk kategori yang bersifat pengaduan informatif dengan 5 (lima) tema pengaduan dominan

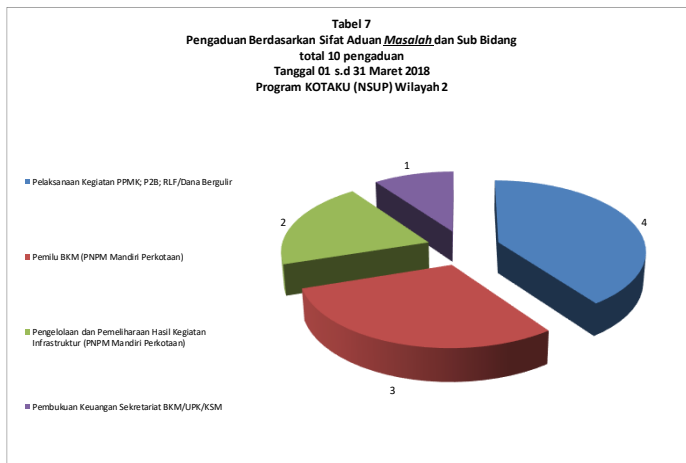
Tabel 6a

INFORMATIF/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2

	D	J	J	K	K	K	M	N	N	P	S	S	S	S	G					
	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	r					
	A	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	a					
	L	I	I																	
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	6	5	10	4	7	14	5	1	7	4	1	1	4	20	6	88	184		
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1			10	11	1				4	1			14	16	40	6	104		
Penetapan pagu alokasi BDI		2		7	5	14		5	1	1	2	1		1	2	11	12	27	91	
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	3		3	7	16	7	1	3		1	1					6	1	1	39	89
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)						6					4							1	69	80
Grand Total	5	8	8	24	35	45	16	13	2	1	14	11	1	2	6	51	17	60	229	548

sebanyak 548 pengaduan dan tema lainnya sebanyak 536 pengaduan (total 1.084 pengaduan). Selengkapnya lihat tabel 6a per provinsi.

Pada kategori yang bersifat masalah pada bulan Maret 2018 pengaduan sebanyak 10



pengaduan (selesai 10 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). Lihat tabel 7.

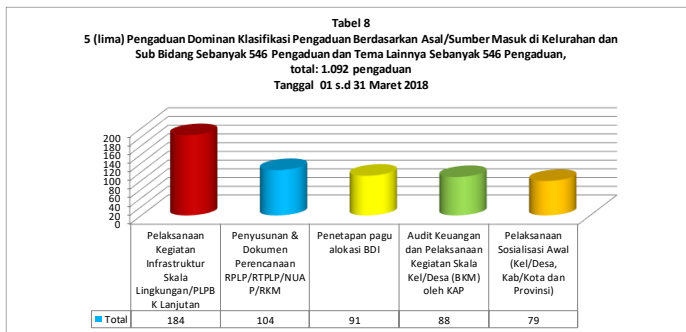
Selengkapnya lihat tabel 7a per provinsi.

Tabel 7a		MASALAH/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2		JAWA BARAT	KALIMANTAN	NUSSA TENGGARA	SULAWESI	Grand Total
Pelaksanaan Kegiatan PPMK; P2B; RLF/Dana Bergulir				1	2	1	4	
Pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan)				3			3	
Pengelolaan dan Pemeliharaan Hasil Kegiatan Infrastruktur (PNPM Mandiri Perkotaan)	2						2	
Pembukuan Keuangan Sekretariat BKM/UPK/KSM				1			1	
Grand Total				2	5	2	10	

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana

pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

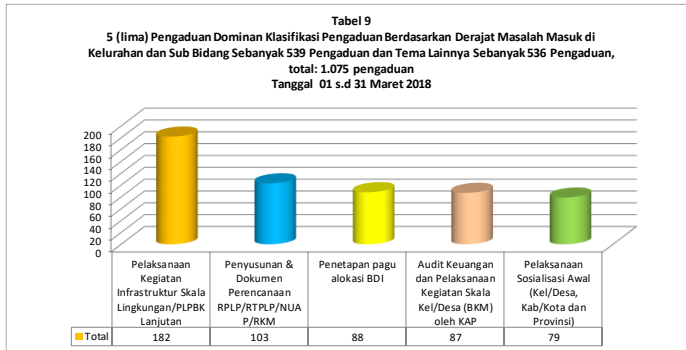


Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan pada bulan Maret 2018 dengan 5 (lima) pengaduan dominan ada 546 pengaduan dan tema lainnya ada 546 pengaduan (total pengaduan selesai 1.092 pengaduan).

Selengkapnya lihat tabel 8a per provinsi.

Tabel 8a		SUMBER ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2		BALIK PANGRAJ	DIA YOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	NUSSA TENGGARA BARAT	NUSSA TENGGARA TIMUR	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGGARA	Grand Total					
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan				1	6	5	10	4	7	14	5	1	7	4	1	1	4	20	6	88	184		
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM				1			10	11	1				4	1			14	16	40	6	104		
Penetapan pagu alokasi BDI					2		7	5	14		5	1	1	2	1	1	2	11	12	27	91		
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP				3		3	7	16	7	1	2		1	1			6	1	1	39	88		
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)								6						3					1	69	79		
Grand Total				5	8	8	24	35	45	16	12	2	1	14	10	1	2	6	51	17	60	229	546

5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah



Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas

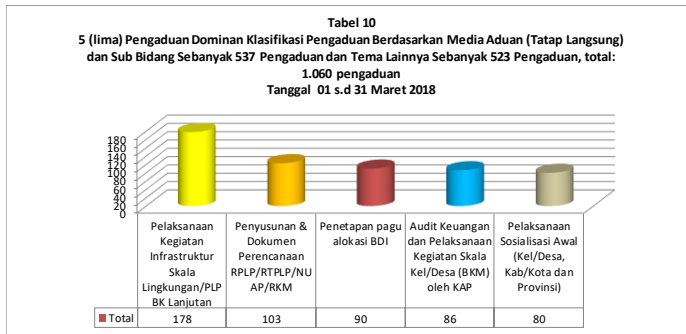
atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat Pusat.

Pada bulan Maret 2018 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan dengan 5 (lima) pengaduan dominan sejumlah 539 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 536 pengaduan (total 1.075 pengaduan).

Tabel 9a di bawah berdasarkan per provinsi.

DERAJAT/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Tabel 9A																		Grand Total	
	BAL	DIA	JAWA BARU	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MAKLUKUTARA	MAKLUKUTARA	MAKLUKUTARA	MAKLUKUTARA	MAKLUKUTARA	MAKLUKUTARA	MAKLUKUTARA	MAKLUKUTARA	MAKLUKUTARA		
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	6	5	10	4	7	12	5	1	7	4	1	1	4	20	6	88	182		
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RT/PLP/NUAP/RKM	1			10	10	1				4	1			14	16	40	6	103		
Penetapan pagu alokasi BDI		2		6	5	14		5	1	1	1			1	2	11	12	27	88	
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	3		3	7	16	7	1	2			1				6	1	1	39	87	
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)						6						3					1	69	79	
Grand Total	5	8	8	23	35	44	14	12	2	1	13	8	1	2	6	51	17	60	229	539

6. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian



Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan tigabelas media untuk mengadu, media tersebut terdiri atas: Tatap Langsung, Buku Pengaduan,

Kotak Pengaduan, Telepon, SMS, Faksimil, Surat, Email, Pengaduan On-Line, Kunjungan Lapangan/Supervisi, Facebook, Twitter, dan Instagram.

Berdasarkan data pada bulan Maret 2018 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung/muka dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 537 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 523 pengaduan (total 1.060 pengaduan).

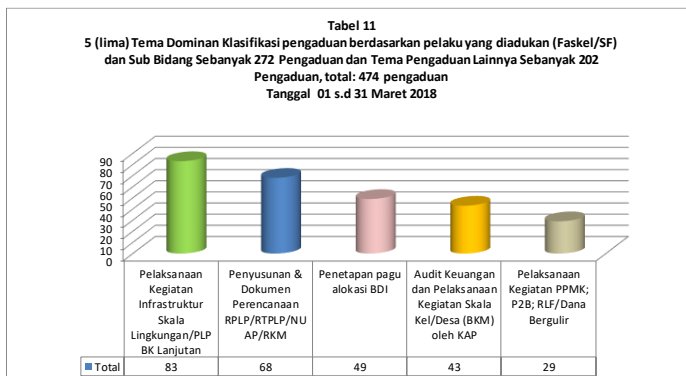
Tabel 10a di bawah berdasarkan per provinsi.

Tabel 10A

MEDIA ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2

	BALI	DIYOGYAKARTA	JAWABARA	JAWATIMUR	KALIMANTAN	KALIMANTANSELATAN	KALIMANTANTIMUR	MALUKU	MALUKUTARA	NUSATENGGARA	NUSAPAPUA	PAPUABARAT	SULAWESI	SULAWESI	SULAWESI	SULAWESI	Grand Total
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	6	5	10	4	7	11	5	1	7	1	1	4	20	6	88	178
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1			10	10	1				4	1			14	16	40	103
Penetapan pagu alokasi BDI		2	7	5	14		4	1	1	2	1		1	2	11	12	90
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	3		3	5	15	7	1	3		1	1			6	1	1	39
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)						6											69
Grand Total	5	8	22	34	44	13	12	2	1	14	8	1	2	6	51	17	60

7. Pengaduan Berdasarkan Pelaku Yang Diadukan



Untuk mengetahui pelaku yang diadukan terdapat 9 pilihan terdiri atas: KSM, BKM/LKM, Aparat Kelurahan/Kecamatan, Aparat Kabupaten/Kota/Provinsi, Faskel/SF, Korkot, KMW/OC/OSP, KMP/Proyek,

dan Kontraktor/Jasa Konsultan.

Berdasarkan data pada bulan Maret 2018 pengaduan yang paling banyak berdasarkan pelaku yang diadakan adalah Fasilitator Kelurahan/Senior Fasilitator (Faskel/SF) dengan 5 (lima) tema

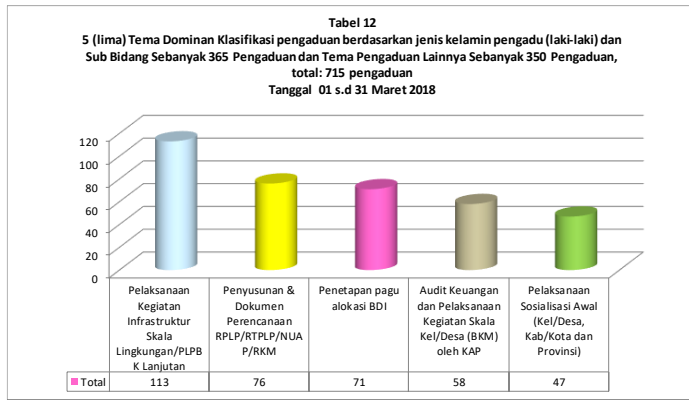
dominan pengaduan sejumlah 272 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 202 pengaduan

(total 474 pengaduan). Tabel 11a di bawah berdasarkan per provinsi.

Tabel 11A

PELAKU YANG DIADUKAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2

	BALI	D I I	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NTB	NTS	NTS	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	Grand Total
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB K Lanjutan						6	3		1		5			1	1	11		2	53	83
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM						9					1					13	10	32	3	68
Penetapan pagu alokasi BDI			2		11		1	1	1		1					11		6	14	49
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	1			4	4						1					6		1	26	43
Pelaksanaan Kegiatan PPMK; P2B; RLF/Dana Bergilir		1	1	1	5						1			1	1	5		15	15	29
Grand Total	1	1	3	9	30	3	1	2	1	8	1	2	2	46	10	56	96	272		



8. Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk pengaduan berdasarkan jenis kelamin terdapat 3 pilihan terdiri atas: Laki-laki, Perempuan, dan Tidak diketahui.

Berdasarkan data pada bulan Maret 2018 pengaduan berdasarkan jenis kelamin pengadu adalah Laki-laki dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 365 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 350 pengaduan (total 715 pengaduan).

Tabel 12a di bawah berdasarkan per provinsi.

Tabel 12A

JENIS KELAMIN PENGADU/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU WILAYAH 2

	BALI	D I I	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NTB	NTS	NTS	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	Grand Total	
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan	1	6	1	9	4	5	10	4	1		6	3	1		1	11		3	47	113	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	1					10	6	1			4	1				12	13	26	2	76	
Penetapan pagu alokasi BDI		1		7	5	10		5	1	1	1			1	2	6			9	71	
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	2		2	6	14	5	1	3								3	1			21	58
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)						3					4									40	47
Grand Total	4	7	3	22	33	29	12	12	2	1	11	9	1	1	3	32	14	38	131	365	

Penutup

Dalam laporan bulan Maret 2018 ini dapat disampaikan bahwa Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah 2 (dua) berjumlah 1.095 pengaduan (selesai 1.095 (100%), proses 0 (0%) pengaduan), sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan & peningkatan kumuh tingkat kota pengaduannya didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (116 pengaduan) dan Provinsi Kalimantan Selatan (51 pengaduan).

Adapun untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa yang paling banyak diadakan adalah mengenai Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan (184 pengaduan atau 27%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota yang paling banyak diadakan adalah mengenai penetapan pagu alokasi BDI (91 pengaduan atau 30%), dan untuk lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan yang banyak diadakan adalah pelaksanaan kegiatan pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (38 pengaduan atau 32%).

Pada laporan PIM ini seluruh Provinsi mengirimkan data pengaduannya. Untuk kenyamanan penginputan data, PIM Pusat berusaha untuk memperbaiki format isian manual PIM agar menjadi lebih mudah dan diupayakan SIM PIM On-Line berbasis website dapat segera dioperasionalkan.